

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online
Jateng				

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 23

## Seluruh Kerja Sama Bakal Dievaluasi

### ■ Dongkrak Partisipasi Wajib Pajak

**UNGARAN** - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, Tavip Supriyanto mengatakan bakal mengevaluasi seluruh bentuk kerja sama melibatkan pihak ketiga, yang sebelumnya dirintis untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pernyataan tersebut dia sampaikan di sela-sela menyaksikan penandatanganan *MoU* antara Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, di aula UPPD Kabupaten Semarang, Kamis (2/5).

Menurutnya, tunggakan pendapatan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), merupakan pendapatan daerah, yang lebih kurang 30 persen di antaranya akan diberikan ke kabupaten/kota untuk pembangunan daerah.

"Kami ingin format yang dilakukan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah bisa meniru format UPPD Kabupaten Semarang," kata Tavip, didampingi Kepala UPPD Kabupaten

Semarang, Listyati Pumama R.

Dia menilai persentase tunggakan PKB di Kabupaten Semarang masih tinggi, yakni 55,12 persen untuk pajak sepeda motor dan 25,47 persen untuk pajak mobil. Apabila dirinci, masih ada lebih kurang Rp 12 miliar tunggakan yang belum dihimpun masuk ke kas Negara.

"Karena itu diperlukan inovasi untuk menumbuhkan partisipasi dan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya, i tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Raharjo Budi Kisnanto mengatakan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili negara ada pemerintah di dalam dan di luar pengadilan.

"Tentunya dilakukan dengan berba-

gai cara dan inovasi. Karena tujuan inti kami adalah sebesar mungkin dapat memasukkan uang untuk memulihkan keuangan Negara," kata Raharjo.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, yang hadir mewakili Bupati Semarang mengapresiasi apa yang sudah dicanangkan UPPD dan Kejaksaan Kabupaten Semarang. Meski lingkup kerja sama tersebut terbatas, menurut Djarot, Pemkab Semarang tetap berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tetap menjadi lembaga yang senantiasa memberikan saran, nasihat atau masukan bagi penanganan tunggakan pajak di Bumi Serasi.

"Serta ikut mengawasi bersama-sama penggunaan dana pembangunan secara konstruktif, agar dana tersebut tidak melewat dari tujuannya," tegas dia. (H86-42)